



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Iskandar, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si.  
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat

Selaku atasan pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

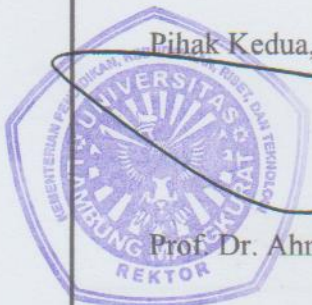
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 01 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si.

Akhmad Iskandar, S.Pd., M.Pd.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terimplementasinya sistem informasi manajemen berbasis ICT yang mendukung operasional dan sistem pengambilan keputusan	Jumlah Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi (Aplikasi)	8 Layanan	Rp 15.000.000,00	PNBP
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik	Jumlah Dosen Bersertifikat Pendidik (IKK)	925 Dosen	Rp 0,00	-
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Sertifikat Kompetensi (IKK)	110 Pegawai (Tendik)	Rp 265.000.000,00	PNBP
	Jumlah Pejabat Fungsional Pustakwan (IKK)	9 Orang	Rp 30.000.000,00	PNBP
	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis (IKK)	18 Orang	Rp 0,00	-
	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	5 Orang	Rp 50.000.000,00	PNBP
	Jumlah Pejabat Fungsional Pranata Komputer	2 Orang	Rp 20.000.000,00	PNBP
	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Anggaran	4 Orang	Rp 0,00	-
	Jumlah Pejabat Fungsional Pranata Humas	1 Orang	Rp 5.000.000,00	PNBP
Meningkatnya tata kelola Unit kerja di lingkungan ULM	Persentase Realisasi Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Unit kerja Minimal 90 % (IKU)	86 %	Rp 15.973.130.000,00	RM
	Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK / Itjen dalam 3 tahun terakhir	54 %	Rp 0,00	-
	Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK / Itjen dalam 3 tahun terakhir	3 %	Rp 0,00	-
	Jumlah dokumen daftar barang dalam ruangan	1 dokumen	Rp 3.000.000,00	PNBP
	Jumlah dokumen daftar barang luar ruangan	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00	PNBP
	Jumlah Dokumen Penghapusan Barang	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00	PNBP
	Jumlah Dokumen Usul Penghapusan Barang (BMN)	1 Dokumen	Rp 3.000.000,00	PNBP

Kegiatan Berdasarkan Sumber Dana	Anggaran
----------------------------------	----------


-	Rp	0,00
4257 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi (Rupiah Murni)	Rp	15.973.130.000,00
4470 - Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)	Rp	0,00
4471 - Peningkatan kualitas dan Kapasitas Perguruan (PNBP)	Rp	397.000.000,00
Sumber Dana Lainnya (Hibah Pemprov, Hibah Dikti, dll)	Rp	0,00
Total	Rp	16.370.130.000,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

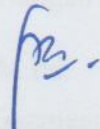
Banjarmasin, 01 November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si.



Akhmad Iskandar, S.Pd., M.Pd.



Nama : Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si.  
 Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Selaku wakil pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan peradilan RI, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterbatasan dan besarnya pelaksanaan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kedua.

Kedua pihak akan melakukan evaluasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pihak kedua menyetujui pengangkatan dan sanksi.

Banjarmasin, 01 November 2022

Pihak Pertama,



Akhmad Iskandar, S.Pd., M.Pd.